

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

*p-ISSN: 1907-2902 (Print)*

*e-ISSN: 2502-8537 (Online)*

### INDEKS KOMPOSIT PEKERJAAN TIDAK LAYAK (IPTL) DI INDONESIA

#### *(COMPOSITE INDEX ANALYSIS OF NON DECENT WORK IN INDONESIA)*

**Katamso Noto Santoso<sup>1</sup>, Hardius Usman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik

<sup>2</sup>Politeknik Statistika STIS

Korespondensi penulis: <sup>1</sup>15.8688@stis.ac.id, <sup>2</sup>hardius@stis.ac.id

#### **Abstract**

*The open unemployment rate in Indonesia was 5.50 in August 2017. This figure was the lowest level in comparison to rates in previous years. The declining rate of unemployment over the past decade was in line with the increasing trend of risky work. This situation may indicate recent job opportunities are likely to be risky or categorized as non-decent works. To understand the conditions of non-decent work in Indonesia, a composite index measurement, which is currently not available, is needed. Thus, this study aims to develop such a composite index called Non-Decent Work Index (NDWI) to fill this gap. The method applied for the composite index formation is factor analysis. The findings indicate three factors of NDWI. It is also found that NDWI has a significant relationship with human development index and labor productivity. Therefore, Indonesia government needs to address the problem of inadequate employment conditions in this country. It is because decent work is the central aspect of efforts to reduce poverty.*

**Keywords:** *non-decent work index, factor analysis, decent work*

#### **Abstrak**

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2017 sebesar 5,50 dan mencapai level terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat penurunan pengangguran selama satu dekade terakhir sejalan dengan kecenderungan meningkatnya kerja berisiko. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang tercipta umumnya berisiko atau tergolong dalam kondisi pekerjaan tidak layak. Untuk memahami kondisi pekerjaan tidak layak di Indonesia, diperlukan pengukuran indeks komposit yang sampai saat ini belum tersedia. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk membentuk indeks komposit yang dinamakan Indeks Pekerjaan Tidak Layak (IPTL). Pembentukan indeks komposit dilakukan dengan metode faktor analisis. Hasil yang diperoleh dari analisis faktor menunjukkan adanya tiga faktor pembentuk IPTL. Selain itu, IPTL memiliki hubungan dengan indikator indeks pembangunan manusia dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi permasalahan kondisi pekerjaan tidak layak di Indonesia mengingat pekerjaan layak merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** indeks pekerjaan tidak layak, analisis faktor, pekerjaan layak

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB merupakan agenda global untuk melindungi bumi dan penduduknya serta memastikan kesejahteraan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Prinsip inklusif dalam SDGs memastikan tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau *no one left behind* dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya terkait pekerjaan yang layak. Pentingnya pekerjaan layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh tujuan ke-8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua” (ILO, 2012, h.4-5).

Pada *International Labour Conference* tahun 1999, direktur umum ILO Juan Somavia menjelaskan konsep yang komprehensif tentang *decent work* atau pekerjaan layak. Pekerjaan yang layak diartikan sebagai pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia seperti kebebasan, kesetaraan, keamanan, serta diperlakukan sesuai martabat manusia (Anker dkk., 2002, h.8). ILO (2012) juga menambahkan bahwa pekerjaan layak harus memberikan fleksibilitas, keamanan, dan dialog. Ketiga dimensi tersebut memungkinkan pencapaian sasaran sosial dan kelembagaan seperti penghasilan yang memadai, kerja yang produktif, waktu kerja yang layak, lingkungan kerja yang aman, stabilitas dan keamanan kerja, jaminan sosial, dialog sosial, serta memungkinkan pekerja untuk menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi (h.4).

Pekerjaan yang layak untuk semua adalah salah satu perhatian utama ILO dan organisasi nasional lainnya yang bersatu untuk mempromosikan nol kemiskinan (Moussa, 2017: h.2). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Waddell & Burton (2006, dalam Moussa, 2017, h.2) yang menunjukkan bahwa pekerjaan memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dalam mencapai kondisi pekerjaan yang layak, pemerintah

Indonesia perlu mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada terkait ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan di negara berkembang seperti Indonesia cukup besar dan multidimensional. Hal ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Pesatnya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menyebabkan timbulnya permasalahan pengangguran. Akan tetapi, selama satu dekade terakhir pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari data yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada periode Agustus 2017 sebesar 5,50. Angka tersebut merupakan yang terendah dibanding periode sebelumnya. Namun, rendahnya pengangguran di suatu daerah belum menjamin penduduk yang bekerja tersebut bekerja pada pekerjaan yang layak dan produktif. Menurut ILO (2012, h.46), tingkat penurunan pengangguran selama satu dekade terakhir sejalan dengan kecenderungan meningkatnya pekerjaan berisiko dan menunjukkan bahwa banyak kesempatan kerja telah diciptakan tapi seringkali dalam kondisi berisiko.

Pekerjaan berisiko mengacu kepada pekerjaan yang tidak layak. Selain itu, BPS (2017a, h.64) mengemukakan ketimpangan antara tingginya angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja produktif menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja dengan jenis pekerjaan yang tidak layak, seperti bekerja sebagai setengah pengangguran ataupun paruh waktu, serta banyak yang harus bekerja di sektor informal. Pekerja bebas – yang merupakan bagian dari pekerja informal – mengalami kenaikan sebesar 0,03% di sektor pertanian dan 0,19% di sektor nonpertanian pada tahun 2017. Semakin bertambahnya pekerja informal akan berimbas pada meningkatnya pekerjaan yang tidak layak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan BPS (2017a, h.25) bahwa pekerja informal pada umumnya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Hal tersebut sesuai dengan Rini (2012, h.202) yang menyatakan mudahnya seseorang memasuki sektor informal mengakibatkan mereka menjadi pekerja tidak terikat dan tidak terampil dengan pendapatan rendah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi

penulis untuk menggunakan data tahun 2017 sebagai studi kasus dalam analisis tulisan ini.

Pekerjaan yang layak merupakan aspek paling utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif, dan berkelanjutan (ILO, 2012, h.4). Selain itu, pekerjaan layak akan menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pekerja yang bersaing global (Cammack, 2004, h.192). Oleh karena itu, ILO melalui Agenda Pekerjaan Layak (*Decent Work Agenda*) mempromosikan pentingnya pekerjaan layak agar setiap orang di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang menjamin kelangsungan hidup mereka (ILO, 2012, h.11).

Melihat kondisi dan akibat dari pekerjaan layak di Indonesia, diperlukan suatu ukuran dalam bentuk indeks guna membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja. Ukuran tersebut dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi pekerjaan layak serta mengevaluasi program pembangunan yang sudah ada. Indonesia belum pernah menyusun indeks komposit guna menggambarkan kondisi pekerjaan layak di Indonesia. Selama ini, penyajian data mengenai pekerjaan layak dilakukan dengan menampilkan pencapaian pada indikator-indikator pekerjaan layak, misalnya proporsi pekerja yang mendapatkan jaminan sosial, angka pekerja subsisten, angka pekerja anak, ataupun *low pay rate*. Indikator yang bersifat parsial ini menyebabkan gambaran pencapaian program menuju kondisi pekerjaan yang layak hanya dapat dilihat secara terpisah, tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan. Penyajian secara agregat akan mempermudah dalam proses pemantauan dan evaluasi program pembangunan pekerjaan layak.

Untuk mempertajam arah dan sasaran mencapai kondisi pekerjaan layak, diperlukan suatu indeks komposit yang dapat menggambarkan kondisi pekerjaan layak ataupun tidak layak. Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini bertujuan untuk menentukan indikator pembentukan Indeks Pekerjaan Tidak Layak (IPTL) di Indonesia, membangun IPTL di Indonesia, mengelompokkan provinsi berdasarkan IPTL dan menganalisis hubungan IPTL dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produktivitas tenaga kerja.

## **METODOLOGI**

### **Kerangka Indikator Pekerjaan Layak**

Dalam merumuskan pekerjaan layak, ILO membuat Agenda Pekerjaan Layak (*Decent Work Agenda*) yang memuat empat pilar strategis, yaitu hak di tempat kerja, pekerjaan penuh dan produktif, perlindungan sosial, dan dialog sosial (ILO, 2012). Berdasarkan empat pilar strategis tersebut, ILO merumuskan kerangka indikator pekerjaan yang layak dalam Konferensi Statistik Ketenagakerjaan Internasional (*International Conference of Labour Statisticians*) ke-18 pada tahun 2008. Kerangka indikator tersebut memuat sepuluh unsur utama, yaitu kesempatan kerja; pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif; jam kerja yang layak; menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi; pekerjaan yang harus dihapuskan; stabilitas dan jaminan pekerjaan; kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; jaminan sosial; serta dialog sosial, representasi pekerja dan pengusaha. Unsur-unsur tersebut bersesuaian dengan empat pilar strategis dalam *Decent Work Agenda*. Setiap unsur tersebut akan diwakili oleh indikator-indikator yang disarankan ILO dengan melihat ketersediaan data BPS.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis faktor. Analisis faktor merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk mereduksi atau meringkas variabel yang banyak menjadi variabel baru yang lebih sedikit yang disebut sebagai faktor (Supranto, 2004). Analisis tersebut bertujuan untuk memadatkan informasi yang terkandung pada sejumlah variabel asli ke dalam suatu set variabel (faktor) yang lebih sederhana dengan meminimalkan hilangnya informasi dari variabel asli (Hair dkk., 2010). Analisis faktor merupakan teknik

interdependensi yang melibatkan data multivariabel dan digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang diduga memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga keterkaitan tersebut dapat dijelaskan dan dikelompokkan pada faktor laten yang tepat (Sharma, 1996).

Dalam analisis faktor, terdapat vektor acak  $\mathbf{X}$  dengan  $p$  komponen yang memiliki rata-rata  $\boldsymbol{\mu}$  dan matriks kovarian  $\boldsymbol{\Sigma}$ . Model faktor menyatakan  $\mathbf{X}$  secara linier dependen dengan beberapa variabel yang tidak terobservasi yang disebut *common factor* ( $F_1, F_2, \dots, F_m$ ), dan sumber variasi lain sejumlah  $p$  yaitu  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p$  yang disebut *error* atau *specific factor*.

### Tahapan Penyusunan Indeks Komposit

Tahapan penyusunan indeks dalam tulisan ini mengadopsi metode yang digunakan OECD sebagai berikut:

1. Membangun kerangka kerja teoritis dan pemilihan variabel/indikator.  
 Kerangka kerja harus secara jelas mendefinisikan fenomena yang akan diukur dan sub-komponennya, dan selanjutnya memilih masing-masing indikator dan bobot yang mencerminkan kepentingan relatif mereka dan dimensi komposit keseluruhan. Proses ini idealnya harus didasarkan pada apa yang ingin diukur dan bukan pada indikator mana yang tersedia.
2. Normalisasi data.  
 Metode normalisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normalisasi *Min-Max*. Metode *Min-Max* mengubah nilai indikator menjadi nilai antara 0 dan 1.
3. Melakukan analisis faktor.  
 Tahapan analisis faktor meliputi uji kelayakan data, reduksi variabel/indikator, pembentukan faktor, estimasi matriks faktor, rotasi faktor, hingga menghasilkan nilai skor faktor.
4. Standardisasi data skor faktor.  
 Standardisasi data skor faktor digunakan untuk memperkecil *range* nilai faktor indeks menjadi nilai 0 sampai 1. Dalam penelitian ini metode normalisasi data yang digunakan ialah metode *Min-Max* kemudian dikalikan 100 untuk mempermudah dalam interpretasi (Haque dkk., 2016, h.102).

$$f'_{ij} = \frac{[f_{ij} - \text{Min}(f_{ij})]}{[\text{Max}(f_{ij}) - \text{Min}(f_{ij})]} \times 100$$

Keterangan:

- $f'_{ij}$  : skor faktor ke- $i$  provinsi ke- $j$  setelah standarisasi
- $f_{ij}$  : skor faktor ke- $i$  provinsi ke- $j$

5. Menentukan penimbang yang akan digunakan.  
 Penimbang yang digunakan dalam penelitian ini adalah *unequal weighting*. Penimbang didapatkan dari proporsi *explained varians* oleh setiap faktor dengan *total explained varians* (OECD, 2008, h.90).

$$W_i = \frac{\text{Explained varians}_i}{\text{Total explained varians}}$$

dengan  $\sum W_i = 1$

6. Melakukan agregasi.  
 Dalam penelitian ini, metode agregasi yang digunakan adalah agregasi linier (*linear aggregation*).

$$IPTL_j = \sum_j \sum_{i=1}^k W_i f'_{ij}$$

Keterangan:

- $IPTL_j$  : indeks pekerjaan tidak layak provinsi ke- $j$
- $W_i$  : bobot faktor ke- $i$
- $f'_{ij}$  : skor faktor ke- $i$  provinsi ke- $j$  setelah standarisasi

7. Melakukan dekomposisi indeks komposit.  
 Penguraian masing-masing faktor pembentuk pada indeks komposit dapat berguna untuk menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi baik atau buruknya nilai indeks komposit pada suatu daerah.
8. Melihat hubungan antara indeks komposit dan indikator lain.  
 Tahapan ini ditujukan untuk menilai seberapa baik kemampuan indeks komposit dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk mendukung analisis ketidakpastian dan sensitivitas. Melihat hubungan serta besar hubungannya dapat dilakukan dengan menggunakan *scatter plot* serta dengan menghitung korelasi Pearson. Dalam tulisan ini akan dilihat hubungan antara indeks pekerjaan layak dan IPM serta produktivitas tenaga kerja.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Pemilihan Indikator Pekerjaan Tidak Layak**

Pemilihan indikator dalam indeks komposit pekerjaan tidak layak mengacu pada kajian Anker dkk. (2002) dan ILO (2012). Selain itu, kajian ini juga merujuk pada publikasi indikator pekerjaan layak yang diterbitkan BPS (2017a). Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data berdasarkan indikator yang disarankan ILO. Publikasi indikator pekerjaan layak 2017 merupakan hasil dari Sakernas Agustus 2017. Dalam mengatasi tidak tersedianya data yang disarankan ILO, kajian ini menggunakan *proxy* variabel yang sesuai dengan menggunakan data Susenas 2017. Setelah diperoleh indikator-indikator yang dapat menggambarkan pekerjaan layak (Tabel 1), analisis faktor dilakukan sebagai seleksi lanjutan untuk memperoleh indikator yang akan digunakan untuk membentuk indeks komposit pekerjaan tidak layak.

Tabel 1. Indikator yang menggambarkan pekerjaan layak 2017

No.	Indikator	Simbol
1	<i>Employment to Population Rate</i> (EPR)	X1
2	<i>Youth Not in Education, Employment, and Training</i> (NEET)	X2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	X3
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda	X4
5	<i>Low Pay Rate</i> (LPR)	X5
6	Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)	X6
7	Angka Pekerja Anak	X7
8	Angka Pekerja Subsisten	X8
9	Tingkat Pekerja Informal (TPI)	X9
10	Persentase penduduk bekerja di sektor pertanian	X10
11	Proporsi perempuan yang bekerja pada posisi manajerial	X11
12	<i>Gender Wage Gap</i>	X12
13	Proporsi pekerja dengan disabilitas	X13
14	Persentase pekerja yang terganggu pekerjaannya akibat keluhan kesehatan	X14
15	Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan sosial	X15
16	<i>Union Density Rate</i> (UDR) atau serikat kerja	X16

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam melakukan seleksi indikator adalah menyeragamkan arah dari masing-masing indikator, bisa dalam bentuk positif maupun negatif. Hal tersebut dilakukan agar dalam analisis lanjutannya tidak terjadi kesalahan interpretasi. Dalam penelitian ini, arah dari masing-masing indikator dibuat positif. Semakin besar nilai dari indikator yang digunakan, maka wilayah tersebut memiliki IPTL yang tinggi atau wilayah tersebut memiliki kondisi pekerjaan yang semakin tidak layak. Oleh karena itu, semua indikator yang digunakan diperlakukan sama agar memperoleh nilai yang dimaksud. Metode yang digunakan dalam penyeragaman data ialah metode *Min-Max*. Metode *Min-Max* mengubah indikator menjadi skor 0-1. Apabila suatu indikator memiliki arah yang negatif dengan tujuan pembentukan indeks maka dilakukan normalisasi *Min-Max* (The Economist Group, 2018, h.37).

Setelah dilakukan normalisasi serta penyeragaman arah indikator, selanjutnya dilakukan analisis faktor untuk mereduksi indikator yang tidak layak untuk dilakukan analisis faktor. Dalam analisis faktor, untuk menguji kelayakan suatu kumpulan data untuk dilakukan analisis faktor ialah dengan melakukan uji *Bartlett* dan *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO). Nilai KMO lebih besar dari 0,5 menunjukkan data sudah layak untuk dianalisis faktor (Hair dkk., 2010). Selain itu, proses reduksi indikator mempertimbangkan nilai pada matriks *anti image correlation* (*Measure of Sampling Adequacy* atau MSA) dan nilai komunalitas. Variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5 harus direduksi dari analisis faktor secara bertahap dengan nilai MSA terkecil dahulu (Hair dkk., 2010). Selain itu, variabel yang memiliki nilai komunalitas kurang dari 0,5 perlu dieliminasi menurut (Hair dkk., 2010, h.117). Berdasarkan proses reduksi indikator, didapatkan 11 indikator yang dapat membentuk indeks komposit. Lima indikator yang tereduksi ialah indikator X8, X11, X12, X13, dan X16.

***Penentuan Faktor dan Penimbang Faktor dalam Indeks Komposit***

Tahapan yang dilakukan setelah indikator terpilih adalah penentuan jumlah faktor serta penamaan setiap faktor tersebut dan penentuan *weight* 'penimbang' untuk tiap

faktor. Penentuan faktor dalam tulisan ini berdasarkan kaidah kriteria Kaiser, yaitu faktor-faktor dengan *eigen value* ‘akar ciri’ bernilai lebih dari satu, diikutsertakan sebagai faktor dominan (OECD, 2008). Apabila terdapat faktor dominan lebih dari satu, dilakukan agregasi dengan penimbang. Penimbang faktor diperoleh melalui perbandingan antara besarnya keragaman yang dapat dijelaskan (*percentage of variance explained*) oleh suatu faktor dan besarnya keragaman total yang dapat dijelaskan oleh seluruh faktor dominan. Penentuan indikator dominan dalam suatu faktor dilihat berdasarkan nilai *loading factor* terbesar dari suatu indikator. Sebelum penentuan indikator dominan dalam suatu faktor, perlu dilakukan rotasi faktor untuk mengatasi suatu indikator yang memiliki nilai *loading factor* yang hampir sama dalam suatu faktor. Rotasi yang dilakukan ialah metode *varimax*. Setelah itu, dilakukan penamaan untuk tiap faktor berdasarkan indikator dominan penyusun faktor (Hair dkk., 2010). Ringkasan perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Setelah mendapatkan jumlah dan penimbang faktor, akan didapatkan nilai skor faktor untuk setiap faktor. Nilai skor faktor yang terbentuk menghasilkan nilai berupa *z-score*. Hal tersebut mengakibatkan nilai skor faktor memiliki rentang nilai dari positif sampai negatif. Skor komposit dengan rentang seperti itu akan menyulitkan dalam analisis karena tidak dapat mengetahui nilai maksimum dan minimum yang dapat dicapai (The Economist Group, 2018, h.37). Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi, nilai skor faktor ditransformasi menjadi suatu indeks yang memiliki nilai maksimum 100 dan minimum 0, yaitu dengan standardisasi *min-max* dikali 100. Cara ini juga dilakukan Haque (2016, h.102) dalam penyusunan *active ageing index*. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai indeks komposit dilakukan penjumlahan hasil perkalian antara penimbang dan skor faktor tiap faktor yang sudah dinormalisasi.

$$IPTL = 0,3955*FAKTOR1 + 0,3739*FAKTOR2 + 0,2306*FAKTOR3$$

Tabel 2. Ringkasan pembentukan dan penimbang faktor

No	Nama Faktor	Indikator	Simbol	% of variance	Penimbang
1.	Kesempatan kerja	<i>Employment to Population Rate (EPR)</i>	X1	32,601	0,3955
		<i>Youth Not in Education, Employment, and Training (NEET)</i>	X2		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	X3		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda	X4		
2.	Hak dan stabilitas kerja	<i>Low Pay Rate (LPR)</i>	X5	30,819	0,3739
		Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)	X6		
		Angka Pekerja Anak	X7		
		Tingkat Pekerja Informal (TPI)	X9		
		Persentase penduduk bekerja di sektor pertanian	X10		
3.	Perlindungan sosial	Persentase pekerja yang terganggu pekerjaannya akibat keluhan kesehatan	X14	19,009	0,2306
		Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan sosial	X15		

### Indeks Pekerjaan Tidak Layak (IPTL)

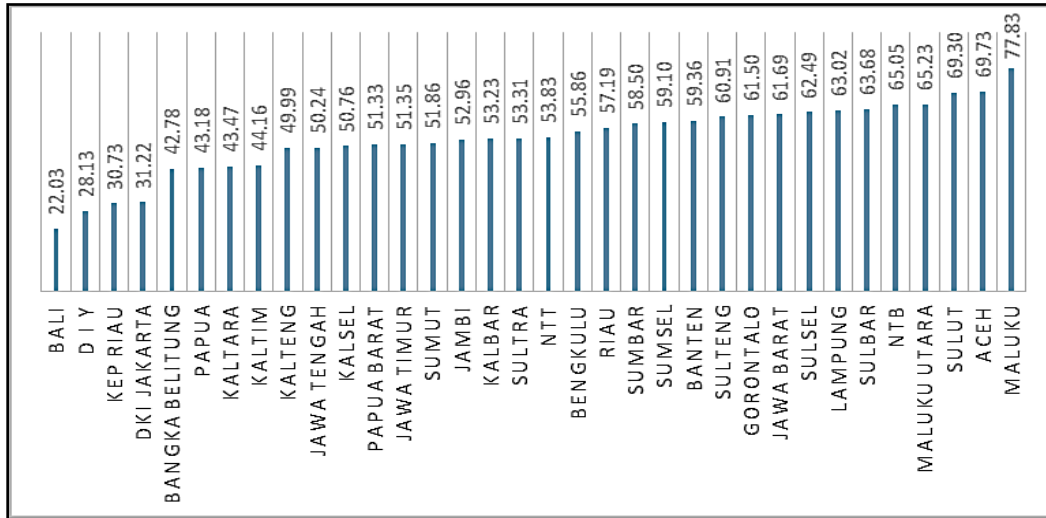
Melalui serangkaian langkah dalam pembuatan indeks komposit yang dikembangkan oleh OECD (2008), IPTL tiap provinsi di Indonesia tahun 2017 disajikan pada Gambar 1. Ukuran indeks ini berkisar antara 0 dan 100. Nilai indeks yang lebih tinggi menggambarkan bahwa kondisi pekerjaan tidak layak di provinsi tersebut lebih

tinggi dibandingkan di provinsi lain. Berdasarkan indeks yang terbentuk, kemudian dilakukan pengelompokan provinsi menggunakan *natural breaks (jenks)* menjadi 5 kelompok. Metode *natural breaks* berguna untuk menentukan jumlah kelompok sebelum algoritma diterapkan pada sekumpulan data. Jumlah kelompok dapat diatur secara manual berdasarkan pengetahuan penulis terkait sekumpulan data, yaitu dalam kelas

homogen dan antarkelas heterogen (North, 2009, h.35). Berdasarkan hasil pengelompokan pada Tabel 3, kelompok pada kategori IPTL sangat rendah terdiri dari empat provinsi. Kemudian, empat provinsi tergolong dalam kelompok IPTL rendah, 11 provinsi masuk pada kelompok IPTL sedang, 12 provinsi lainnya masuk pada

kelompok IPTL tinggi, dan tiga provinsi sisanya masuk pada kelompok IPTL sangat tinggi. Tiga provinsi yang masuk pada kelompok IPTL sangat tinggi adalah Provinsi Maluku, Aceh, dan Sulawesi Utara.

Gambar 1. Indeks Pekerjaan Tidak Layak (IPTL) di Indonesia Tahun 2017



Tabel 3. Pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Pekerjaan Tidak Layak (IPTL)

IPTL Sangat Rendah	IPTL Rendah	IPTL Sedang	IPTL Tinggi	IPTL Sangat Tinggi
51. Bali	19. Babel	62. Kalteng	14. Riau	81. Maluku
34. D I Y	94. Papua	33. Jawa Tengah	13. Sumbar	11. Aceh
21. Kep Riau	65. Kaltara	63. Kalsel	16. Sumsel	71. Sulut
31. DKI Jakarta	64. Kaltim	91. Papua Barat	36. Banten	
		35. Jawa Timur	72. Sulteng	
		12. Sumut	75. Gorontalo	
		15. Jambi	32. Jawa Barat	
		61. Kalbar	73. Sulsel	
		74. Sultra	18. Lampung	
		53. NTT	76. Sulbar	
		17. Bengkulu	52. NTB	
			82. Maluku Utara	

Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan IPTL tertinggi dengan nilai indeks sebesar 77,83. Tidak hanya itu, pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini juga merupakan yang tertinggi di Indonesia (9,29%). Tingginya TPT diperkirakan karena penurunan industri di sektor perikanan, sektor yang menjanjikan di Maluku (BPS, 2017b). Hal tersebut dikarenakan Maluku adalah provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, yaitu 10.630 kilometer atau

11,3% dari total garis pantai Indonesia, serta provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Maluku juga sangat melimpah, yaitu mencapai lebih dari tiga juta ton per tahun, yang tersebar pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut masih belum optimal. Pada tahun 2016, masyarakat Maluku hanya memanfaatkan potensi tersebut tidak lebih

dari 18,5%. Tidak hanya itu, penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,05%.

Provinsi kedua dengan IPTL tertinggi ialah Provinsi Aceh dengan nilai indeks sebesar 69,73. Tingginya IPTL sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini. Pada Agustus 2017, Aceh merupakan provinsi dengan TPT tertinggi di Pulau Sumatera. Kondisi pekerjaan tidak layak diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja di Aceh merupakan tenaga kerja di sektor informal (59,58%) dan umumnya kurang memiliki perlindungan yang memadai. Selain itu, dominasi tenaga kerja dengan kualitas pendidikan rendah (setingkat SD ke bawah) yang mencapai 30,64% menambah buruknya kondisi pekerjaan di Aceh. Rendahnya kualitas tenaga kerja serta penyerapan tenaga kerja potensial yang belum maksimal juga dapat dilihat dari besarnya TPT pada angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi. Angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SMA Kejuruan dan SMA Umum memiliki TPT tertinggi sebesar 10,74% dan 10,95%, sedangkan TPT terendah adalah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 2,32%. Hal tersebut menandakan masih banyak tenaga kerja potensial lulusan SMA sederajat belum terserap secara maksimal dan sebagian besar tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah (BPS, 2017c).

Provinsi ketiga yang memiliki nilai IPTL tertinggi ialah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 69,30. Tingginya IPTL di Sulawesi Utara disinyalir karena rendahnya kualitas pekerja. Untuk mengukur kualitas seorang pekerja, salah satunya dapat dilakukan dengan melihat indikator tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pekerja. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa kualitas pekerja di Sulawesi Utara masih tergolong rendah sebab lebih dari separuhnya hanya tamatan pendidikan dasar, bahkan mereka yang tidak tamat SD masih di atas 10%. Selain itu, rendahnya kualitas tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja berkualitas juga terjadi di Sulawesi Utara. Hasil Sakernas Agustus 2017 juga menunjukkan bahwa lebih dari tiga per empat pengangguran di Sulawesi Utara memiliki ijazah SLTA dan perguruan tinggi dengan persentase yang meningkat

sebesar 10% dari kondisi Agustus 2016. Sebaliknya, persentase penganggur yang berpendidikan dasar (SLTP ke bawah) turun 9 poin. Namun, turunnya persentase pengangguran berpendidikan dasar berbanding terbalik dengan meningkatnya persentase setengah pengangguran berpendidikan dasar. Hal tersebut disinyalir karena mereka yang berpendidikan dasar memilih untuk masuk pasar kerja daripada menganggur, walaupun bekerja pada jam kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga rendah. Oleh karena itu, masalah setengah pengangguran perlu mendapat perhatian karena erat kaitannya dengan pekerja miskin (BPS, 2017d).

Rendahnya pemanfaatan tenaga kerja usia muda juga menjadi permasalahan serius di Sulawesi Utara. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda di provinsi ini.. Hasil Sakernas 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi tertinggi kedua dengan tingkat pengangguran terbuka usia muda sebesar 31,04%. Tingginya pengangguran usia muda memiliki dampak dan risiko yang lebih besar dibandingkan kelompok lain, karena penduduk usia muda umumnya memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lain. Dengan demikian, kurangnya pemanfaatan SDM pada kelompok ini mempunyai dampak negatif yang besar terhadap perekonomian. Sejalan dengan hal itu, rendahnya kualitas penduduk usia muda di Sulawesi Utara juga menjadi sumber permasalahan lain. Hal tersebut tecermin pada tingginya indikator penduduk usia muda tanpa kegiatan di wilayah ini. Situasi ini berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi pada masa sekarang dan masa depan. Hal itu dikarenakan penduduk usia muda merupakan *opportunity youth*, sehingga mereka yang tidak sekolah dan tidak bekerja (pengangguran) dapat disebut sebagai *the economic burden of opportunity* (Belfield dkk., 2012, h.10-11).

### **Dekomposisi IPTL**

Tahap dekomposisi atau penguraian pada indeks komposit dapat berguna untuk menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi baik atau buruknya nilai indeks komposit pada suatu daerah berdasarkan tiap faktor yang terbentuk. OECD (2008, h.35) menyebutkan bahwa



dekomposisi indeks komposit dapat menjelaskan pencapaian tiap provinsi berdasarkan faktor-faktor yang terbentuk. Selain itu, tahapan ini menelusuri kondisi pekerjaan tidak layak pada tiap faktor pembentuknya sehingga analisis yang dilakukan lebih komprehensif.

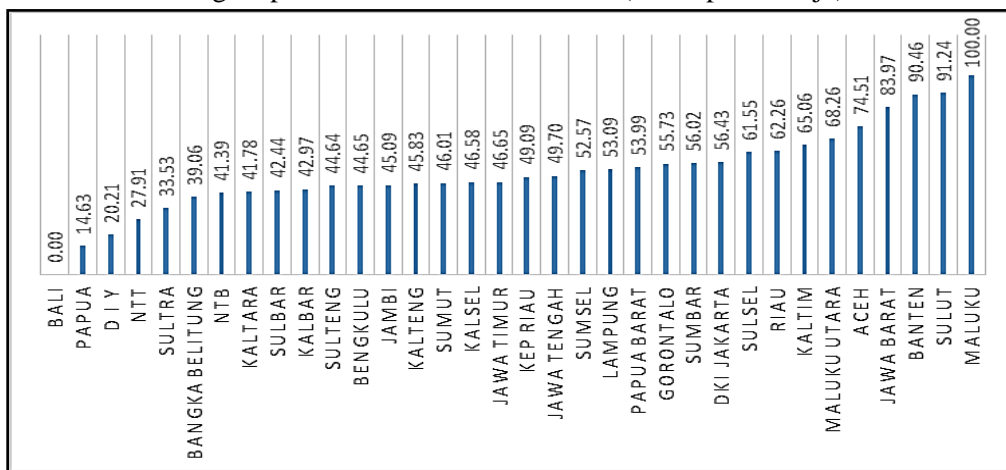
**Faktor 1: Kesempatan Kerja**

Faktor kesempatan kerja menjelaskan 32,6% dari total variasi pada kondisi pekerjaan tidak layak di Indonesia. Kesempatan kerja merupakan unsur kunci dari pekerjaan layak karena menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang dihadapi oleh pekerja dan pencari kerja (BPS, 2017a). Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama menjaga hubungan industrial agar dapat menciptakan lapangan kerja baru (ILO, 2011). Tidak hanya itu,

penciptaan kesempatan kerja harus menjadi pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi agar dapat menghasilkan peluang kerja yang layak serta pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif (ILO, 2016, h.2).

Berdasarkan Gambar 2, Maluku, Sulawesi Utara, dan Banten merupakan provinsi yang mempunyai nilai faktor pertama tertinggi. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketiga provinsi tersebut memiliki kesempatan kerja yang rendah, salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pekerjaan pada provinsi tersebut tidak layak. Kondisi pekerjaan tidak layak yang tecermin melalui rendahnya kesempatan kerja pada provinsi-provinsi tersebut disebabkan oleh buruknya indikator-indikator yang menyusun faktor kesempatan kerja.

Gambar 2. Peringkat provinsi berdasarkan faktor 1 (kesempatan kerja)



**Faktor 2: Hak dan Stabilitas Kerja**

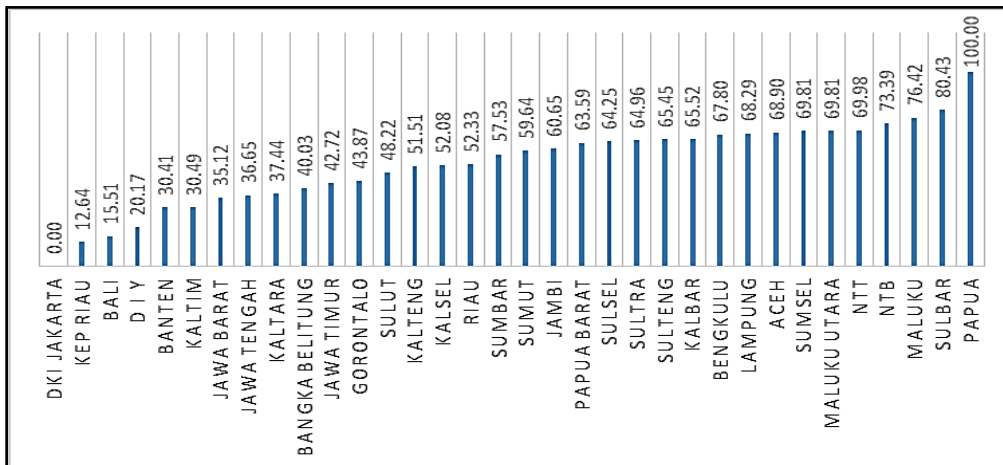
Faktor kedua adalah faktor hak dan stabilitas kerja yang menjelaskan 30,82% dari total variasi. Salah satu hak dalam bekerja ialah upah yang layak (BPS, 2017a). Tidak hanya itu, hak mendapatkan lapangan kerja yang penuh dan produktif juga menjadi agenda pekerjaan layak. Selain itu, pekerjaan berisiko menjadi sorotan karena mengacu kepada pekerjaan tanpa stabilitas (ILO, 2012). Salah satu bentuk dari pekerjaan yang berisiko ialah pekerjaan informal. Hal tersebut dikarenakan bentuk-bentuk pekerjaan dengan relasi pekerjaan informal biasanya mengabaikan standar-standar perburuhan yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia. Menurut

Basjir (2003, h.15), relasi pekerjaan informal, terutama dalam kasus pekerjaan yang diselesaikan di tempat tinggal buruh, biasanya melibatkan anggota keluarga lainnya seperti anak-anak. Terkait hal tersebut, terjadi pelanggaran terhadap standar pekerjaan internasional yang melarang pekerja anak (*child labour*). Keberadaan pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran hak dasar anak yang dianggap dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Basjir, 2003, h.15-16). Bentuk pekerjaan yang berisiko lainnya ialah pekerjaan di sektor pertanian. Lima sumber utama risiko pekerjaan di sektor pertanian meliputi risiko produksi atau teknis, risiko pasar atau harga, risiko teknologi, risiko legal atau sosial, dan risiko kesalahan manusia (Sonka & Patrick, 1984 dan Adiyoga

& Soetarso, 1999, dalam Saptana dkk., 2010, h.117). Gambar 3 menunjukkan bahwa Papua, Sulawesi Barat, dan Maluku merupakan tiga provinsi tertinggi pada faktor kedua. Tingginya nilai pada faktor ini menjelaskan bahwa

hak dan stabilitas pada provinsi tersebut paling rendah dan memengaruhi kondisi pekerjaan tidak layak di wilayah ini.

Gambar 3. Peringkat provinsi berdasarkan faktor 2 (hak dan stabilitas kerja)

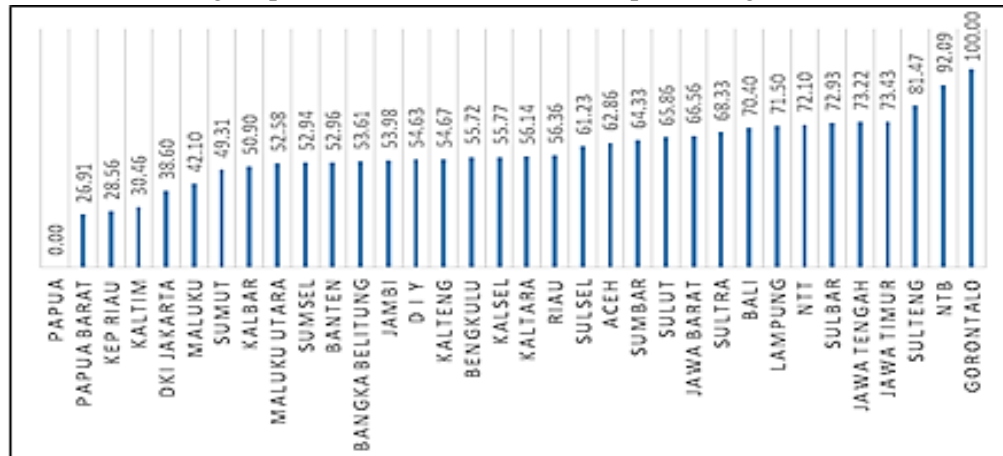


### Faktor 3: Perlindungan Sosial

Faktor ketiga yang menggambarkan IPTL ialah perlindungan sosial (19,01% dari total variasi). Perlindungan sosial berarti perlindungan dari kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan serta cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit (BPS, 2017a). Sementara itu, ILO (2016) menyatakan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada

kelompok-kelompok rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. Tujuan dari faktor ini adalah untuk melindungi pekerja dari kerentanan dan kerugian yang diakibatkan karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau telah memasuki usia tua. Tingginya nilai pada faktor perlindungan sosial di suatu provinsi menjelaskan bahwa provinsi tersebut memiliki perlindungan sosial yang rendah. Rendahnya perlindungan sosial akan menyebabkan kondisi pekerjaan tidak layak. Provinsi yang memiliki perlindungan sosial terendah ialah Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Gambar 4. Peringkat provinsi berdasarkan faktor 3 (perlindungan sosial)



### Hubungan IPTL dan Indikator Lain

IPTL merupakan suatu indeks komposit yang dibentuk untuk menilai kondisi pekerjaan tidak layak di suatu provinsi berdasarkan unsur-unsur pekerjaan layak yang disarankan ILO. Menilai seberapa baik indeks komposit dalam menjelaskan fenomena yang diukur dapat dilakukan dengan menghubungkan indeks komposit yang dibentuk dengan indikator lain (OECD, 2008, h.21). Selain itu, hasil tersebut dapat digunakan untuk mendukung analisis ketidakpastian dan kepekaan dari indeks komposit yang dibentuk. Kajian ini mengidentifikasi hubungan IPTL dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan produktivitas tenaga kerja menggunakan *scatter plot* dan korelasi.

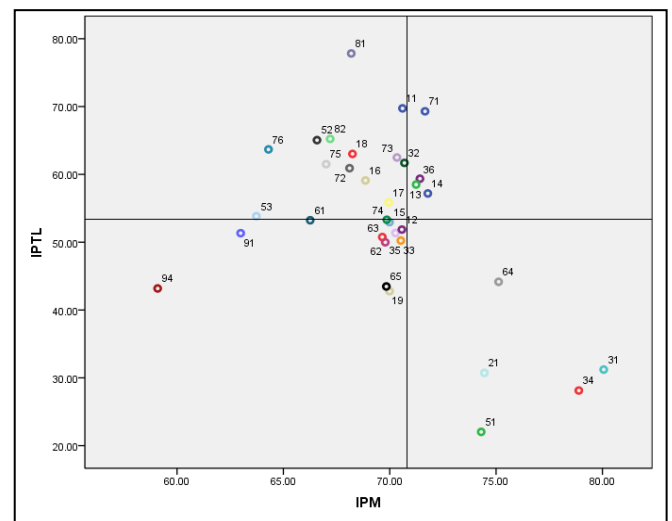
### Hubungan IPTL dan IPM

Identifikasi hubungan dilakukan antara IPTL dan IPM tahun 2017 karena indeks tersebut sudah baku penggunaannya di tingkat nasional ataupun internasional. Selain itu, secara teoritis kedua indeks tersebut memiliki hubungan. Hal tersebut dikarenakan pentingnya modal manusia sebagai *input* maupun *output* dalam komponen pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Pembangunan ekonomi yang biasanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan *trickle down effect* untuk mengatasi masalah-masalah lain (Todaro, 1997, dalam Norton, 2002, h.263). Salah satu masalah yang akan teratasi dari pertumbuhan ekonomi ialah pekerjaan yang menjadi lebih layak. Hal ini sesuai dengan target SDGs poin kedelapan, yaitu kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 5 (disajikan dalam kode provinsi) dapat dilihat adanya hubungan antara IPTL dan IPM. Terlihat adanya kecenderungan pola yang menunjukkan korelasi negatif. Pola tersebut menunjukkan bahwa tingginya nilai IPTL di suatu wilayah mencerminkan kecenderungan rendahnya nilai IPM. Sebagai contoh, Maluku, Maluku Utara, NTB, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan NTT merupakan provinsi dengan IPTL yang tinggi dan nilai IPM yang rendah.

Dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat korelasi yang signifikan antara IPTL dan IPM sebesar  $-0,468$ . Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan negatif antara kedua indeks tersebut. Selain itu, semakin rendah pembangunan manusia di suatu wilayah, maka semakin tidak layak kondisi pekerjaan di wilayah tersebut. Rendahnya pembangunan manusia menggambarkan buruknya kualitas modal manusia sebagai sumber daya dalam pembangunan ekonomi dan kemudian berimbas pada buruknya kualitas pekerjaan. Sebaliknya, kondisi pekerjaan yang tidak layak di suatu daerah juga dapat menyebabkan turunnya kualitas hidup masyarakat setempat dan kemudian dapat memengaruhi rendahnya pembangunan manusia.

Gambar 5. *Scatter plot* antara IPTL dan IPM



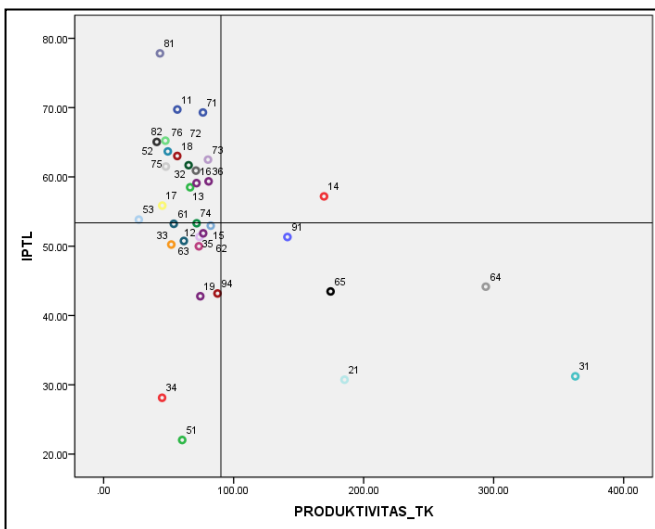
### Hubungan IPTL dan Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dan kondisi pekerjaan tidak layak di suatu daerah secara teoritis mempunyai hubungan (Anker dkk., 2002, h.5). Semakin rendah produktivitas tenaga kerja di suatu daerah menunjukkan daerah tersebut akan memiliki kondisi pekerjaan yang tidak layak. Produktivitas tenaga kerja yang rendah dapat menggambarkan rendahnya efisiensi dan kemajuan teknologi di suatu daerah yang kemudian akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil studi Nordhaus (2005, dalam Siregar & Wahyuniarti, 2008, h.35) menunjukkan bahwa peningkatan teknologi pada sektor padat karya (seperti pertanian dan industri agro) meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Situasi ini

mengindikasikan bahwa kenaikan produktivitas dan daya saing produk sektor tersebut menyebabkan harga jual yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut. Kenaikan permintaan ini pada gilirannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingginya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah berpengaruh terhadap kondisi pekerjaan layak di daerah tersebut. Produktivitas tenaga kerja dalam tulisan ini didapatkan dari output per tenaga kerja, yaitu PDRB riil per jumlah penduduk bekerja pada tiap provinsi.

Gambar 6 (disajikan dalam kode provinsi) menunjukkan hubungan antara IPTL dan produktivitas tenaga kerja, dengan arah pola hubungan negatif. Perhitungan korelasi Pearson menunjukkan nilai korelasi sebesar  $-0,447$  yang signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin rendah produktivitas tenaga kerja di suatu daerah, maka IPTL semakin tinggi atau kondisi pekerjaan di daerah tersebut semakin tidak layak. Siregar & Wahyuniarti (2008, h.35) mengungkapkan bahwa rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja, yang berimbas pada kondisi pekerjaan yang tidak layak di suatu daerah. Sebaliknya, kondisi pekerjaan tidak layak akan membuat pekerja tidak bekerja secara produktif karena merasa tidak nyaman dalam bekerja dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi sebagai manusia sekaligus pekerja.

Gambar 6. Scatter plot antara IPTL dan produktivitas tenaga kerja



## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka indikator dalam penelitian ini disusun berdasarkan empat pilar strategis dalam Agenda Pekerjaan Layak ILO. Berdasarkan kerangka tersebut, indeks komposit pekerjaan tidak layak disusun dari 16 indikator yang kemudian dilakukan penyeleksian indikator dengan analisis faktor sehingga menjadi 11 indikator;
2. Berdasarkan tahap pembentukan indeks komposit yang telah dilakukan, terbentuk tiga faktor dalam membangun indeks pekerjaan tidak layak. Faktor pertama “kesempatan kerja”, faktor kedua “hak dan stabilitas kerja”, dan faktor ketiga “perlindungan sosial”. *Weight* dari faktor pertama hingga ketiga berturut-turut sebesar 0,3955; 0,3739; dan 0,2306;
3. Berdasarkan hasil pengelompokan provinsi menjadi lima kelompok menggunakan metode *natural breaks (Jenks)*, terdapat empat provinsi yang dikelompokkan memiliki IPTL yang sangat rendah, yaitu Bali, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Kemudian, empat provinsi tergolong kelompok IPTL rendah, 11 provinsi masuk ke kelompok IPTL menengah atau sedang, dan 12 provinsi masuk ke kelompok IPTL tinggi. Tiga provinsi sisanya dikategorikan memiliki IPTL yang sangat tinggi, yaitu Maluku, Aceh, dan Sulawesi Utara;
4. Hubungan atau korelasi antara IPTL yang terbentuk dan IPM menunjukkan hubungan yang signifikan negatif dan sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal manusia memiliki hubungan dengan kondisi pekerjaan yang tidak layak. Selain itu, hasil korelasi IPTL dengan produktivitas tenaga kerja menunjukkan hubungan signifikan negatif yang membuktikan bahwa rendahnya produktivitas tenaga kerja disuatu daerah berhubungan dengan tingginya kondisi pekerjaan tidak layak. Dari hubungan IPTL dengan indikator makro diatas, dapat disimpulkan bahwa IPTL cukup tepat dalam menggambarkan kondisi pekerjaan tidak layak di Indonesia tahun 2017.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang baik untuk pemerintah maupun penelitian yang akan datang, yaitu:

1. Bagi pemerintah, indeks pekerjaan tidak layak dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan untuk menciptakan kondisi pekerjaan yang layak. Pemerintah perlu memprioritaskan provinsi yang memiliki IPTL yang tinggi untuk mencapai salah satu tujuan dari SDGs poin kedelapan, yaitu menciptakan pekerjaan layak untuk semua.
2. Dalam menciptakan kondisi pekerjaan yang layak pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor secara bersama-sama, yaitu kesempatan kerja, hak dan stabilitas kerja, serta perlindungan sosial. Hal tersebut dikarenakan konsep pekerjaan layak yang multidimensional sehingga perlu diperhatikan secara bersama-sama untuk menciptakan kondisi pekerjaan yang layak di suatu daerah. Ketiga faktor tersebut terpilih berdasarkan hasil penelitian ini dan kajian dari berbagai sumber.
3. Dalam menciptakan kondisi pekerjaan yang layak, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain yang dapat berhubungan dengan pekerjaan layak. Pemerintah perlu memperhatikan pembangunan manusia dalam bentuk meningkatkan kualitas modal manusia agar kondisi pekerjaan yang layak dapat tercapai. Apabila kondisi pekerjaan layak tercapai, hal ini dapat berpengaruh pada tingginya produktivitas tenaga kerja yang sekaligus dapat berdampak terhadap pembangunan manusia.
4. Penelitian selanjutnya perlu mempelajari lebih dalam lagi untuk penyempurnaan indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran IPTL. Selain itu, perlu dilakukan pengukuran indeks pekerjaan tidak layak pada level yang lebih rendah seperti level kabupaten/kota ataupun individu. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan data pada level yang lebih rendah (kabupaten/kota), terutama untuk indikator-

indikator yang digunakan dalam pembentukan indeks pekerjaan tidak layak.

5. Perlu juga dilakukan uji validitas dan *robustness* dari IPTL yang telah terbentuk. Hal tersebut untuk menguji apakah indeks yang dibentuk telah sesuai untuk menjelaskan fenomena yang diukur. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menghitung IPTL tiap tahun. Hal tersebut berguna untuk memantau perkembangan IPTL disuatu daerah setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F., & Ritter, J. A. (2002). Measuring decent work with statistical indicators. *International Labour Review*, 142(2), 147-178. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms\\_079089.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079089.pdf)
- Basjir, W. W. (2003). Informalisasi dan tantangan perburuhan. *Jurnal Analisis Sosial*, 8(3), 1-20. <https://media.neliti.com/media/publications/490-ID-antara-informalisasi-jaminan-sosial-dan-pengorganisasian-buruh.pdf>
- Belfield, C. R., Levin, H.M., & Rosen, R. (2012, January). *The economic value of opportunity youth*. [https://aspencommunitysolutions.org/wp-content/uploads/2018/07/Economic\\_Value\\_of\\_Opportunity\\_Youth\\_Report.pdf/](https://aspencommunitysolutions.org/wp-content/uploads/2018/07/Economic_Value_of_Opportunity_Youth_Report.pdf/)
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2017a). *Indikator pekerjaan layak di Indonesia 2017*. BPS.
- \_\_\_\_\_. (2017b). *Berita resmi statistik: Keadaan ketenagakerjaan Maluku Agustus 2017*. BPS.
- \_\_\_\_\_. (2017c). *Berita resmi statistik: Keadaan ketenagakerjaan Aceh Agustus 2017*. BPS.
- \_\_\_\_\_. (2017d). *Profil ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017*. BPS.
- Cammack, P. (2004). What the World Bank means by poverty reduction and why it matters. *New Political Economy*, 9(2), 189-211. <https://doi.org/10.1080/1356346042000218069>

- Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis*. Pearson Prentice Hall.
- Haque, M.N., Soonthornhdada, K., Hunchangsith, P., & Kanchanachitra, M. (2016). Active ageing level in Thailand: A comparison between female and male edlderly. *J Health Res*, 30(2), 99-107. <https://doi.org/10.14456/jhr.2016.14>
- ILO [International Labour Organization]. (2011, 5 Desember). *Menteri Tenaga Kerja promosikan konsep pekerjaan layak di sidang ILO Jepang*. [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_169542/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_169542/lang--en/index.htm).
- \_\_\_\_\_. (2012). *Profil pekerjaan yang layak di Indonesia*. ILO.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Kerja layak dan agenda untuk pembangunan berkelanjutan*. ILO.
- Moussa, R.K. (2017). Elicitation of the determinants of decent work in developing countries: Evidence from Côte d'Ivoire. *Economics Bulletin*, 37(1), 494-507.
- North, M. A. (2009). A method for implementing a statistically significant number of data classes in the Jenks algorithm. *2009 Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery*. <https://doi.org/10.1109/fskd.2009.319>
- Norton, S.W. (2002). Economic growth and poverty: In search of trickle down. *Cato Journal*, 22(2), 263-275. [https://www.researchgate.net/publication/277748747\\_Economic\\_Growth\\_and\\_Poverty\\_In\\_Search\\_of\\_Trickle-Down#fullTextFileContent](https://www.researchgate.net/publication/277748747_Economic_Growth_and_Poverty_In_Search_of_Trickle-Down#fullTextFileContent)
- OECD [Organization for Economic Co-Operation and Development]. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD.
- Rini, H. S. (2012). Dilema keberadaan sektor informal. *Komunitas*, 4(2), 200-209. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>
- Saptana, S., Daryanto, A., Daryanto, H. K., & Kuntjoro, K. (2010). Strategi manajemen resiko petani cabai merah pada lahan sawah dataran rendah di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 7(2), 115-131. <https://doi.org/10.17358/jma.7.2.115-131>
- Sharma, S. (1996). *Applied multivariate techniques*. John Wiley and Sons, Inc.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2008). *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia*. Departemen Pertanian.
- Supranto, J. (2004). *Analisis multivariate*. Rineka Cipta.
- The Economist Group. (2018). *Global food security index*. The Economist Intelligence Unit.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Pearson Education.